

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
DENPASAR

NOMOR KEP- 34 /BPP.07/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
DENPASAR TAHUN 2015-2019

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KEEMPAT dan Diktum KEDELAPAN Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, perlu menyusun Rencana Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa berdasarkan Diktum KEDELAPAN Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar berwenang untuk menetapkan Rencana Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa dalam rangka terciptanya keseragaman pemahaman dan pelaksanaan atas penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasidi lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-7/MK.1/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana StrategisUnit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar tentang Rencana Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1102);
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019;
 4. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-...../PP/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DENPASAR TENTANGRENCANA STRATEGIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DENPASAR TAHUN 2015-2019.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Denpasar ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Wakil Menteri Keuangan;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; dan
 4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Mei 2015

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN DENPASAR,



KUSUMANINGTYAS
NIP. 19680212 199501 2 001

RENCANA STRATEGIS
BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR
TAHUN 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan strategis merupakan suatu perangkat manajemen dalam memandang masa depan dan melihat peluang atau tantangannya untuk mencapai visi dan menjalankan misi organisasi. Perencanaan strategis tidak hanya memperkirakan kejadian masa depan, namun juga memengaruhi masa depan melalui mobilisasi sumber daya dan kegiatan. Mengingat pentingnya perencanaan strategis tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap kementerian untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk periode lima tahun.

Balai Diklat Keuangan Denpasar merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui penyelenggaraan, yang mencakup wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk melaksanakan peran tersebut, Balai Diklat Keuangan Denpasar telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Keuangan Denpasar tahun 2015-2019 yang meliputi rumusan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi sebagai arah pedoman Balai Diklat Keuangan Denpasar untuk lima tahun ke depan.

Renstra Balai Diklat Keuangan Denpasar merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Renstra tersebut akan diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Balai Diklat Keuangan Denpasar dengan memperhatikan faktor internal dan lingkungan strategis. Dengan Renstra, organisasi mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan internal organisasi yang dimiliki, peluang yang dimiliki organisasi, serta tantangan dari luar organisasi.

1.1 Kondisi Umum

Balai Diklat Keuangan Denpasar telah menetapkan rencana strategis tahun 2010-2014 dengan visi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggungjawab di wilayah kerja Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam mewujudkan visi tersebut, Balai Diklat Keuangan Denpasar menetapkan misi melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui pendidikan dan pelatihan dan misi khusus: 1) meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta bidang keuangan dan kekayaan negara, 2) mewujudkan tata kelola yang baik di Balai Diklat Keuangan Denpasar.

Dalam rangka menunjang visi dan misi tersebut, Balai Diklat Keuangan Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik.

Berikut rincian pencapaian untuk setiap tujuan dan sasaran tersebut:

1.1.1 Menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Negara Yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi Dan Bertanggung Jawab Melalui Pendidikan Dan Pelatihan

- a. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Penelitian dan Pemutakhiran Data Kebutuhan Diklat.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat, Balai Diklat Keuangan Denpasar telah meraih capaian sebagai berikut:

- 1) Pencapaian IKU % jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kementerian Keuangan, yaitu sebesar 104,265% untuk tahun 2014, dimana target yang ditetapkan sebesar 0,0605%, sedangkan realisasinya sebesar 0,0631%;
- 2) Pencapaian IKU % Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan predikat baik sebesar 102,13%, dimana target yang ditetapkan sebesar 85%, dan realisasinya sebesar 86,81 %.

b. Kualitas Layanan Diklat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan.

Dalam mencapai sasaran terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan, Balai Diklat Keuangan Denpasar telah mencapai target IKU persentase capaian kualitas layanan prima dalam pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2014, IKU ini diubah menjadi 4 IKU dengan capaian masing-masing, yaitu: (i) indeks kepuasan peserta diklat atas pengajar (104,25%); (ii) indeks kepuasan peserta diklat atas bahan ajar (103,13%); (iii) indeks kepuasan peserta diklat atas metodologi pembelajaran (102,5%); dan (iv) indeks kepuasan peserta diklat atas sarana dan prasarana (102,5%).

c. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan, beberapa hal yang telah dicapai adalah:

- 1) Balai Diklat Keuangan Denpasar telah memanfaatkan fasilitas *video conference* dalam penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi baik dengan Pusdiklat-Pusdiklat maupun Sekretariat BPPK sejak tahun 2011;
- 2) Balai Diklat Keuangan Denpasar telah memanfaatkan intranet BPPK yang bernama *Communication Media for Education and Training* (COMET) dalam berbagi informasi antar pegawai BPPK sejak tahun 2012;

- 3) Balai Diklat Keuangan Denpasar telah memanfaatkan BPPK TV sejak tahun 2011 sebagai sarana untuk mendapat informasi yang menarik;
 - 4) Balai Diklat Keuangan Denpasar telah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Diklat (SIMDIKLAT) sejak tahun 2011.
- d. Capaian dalam mewujudkan akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset, sebagai berikut:
- 1) Capaian IKU Penyerapan anggaran (non belanja pegawai)
Pada tahun 2014, IKU tersebut diubah menjadi persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja dengan target sebesar 95% dan realisasi sebesar 102,7%, sehingga capaian atas IKU ini sebesar 108,11%.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki Balai Diklat Keuangan Denpasar untuk dapat menangkap peluang yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi BDK Denpasar berada di Gedung Keuangan Negara, sehingga relative dekat dengan unit pengguna;
- b. Wilayah kerja BDK Denpasar cukup luas, yang meliputi Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan potensi peserta diklat dari SDM Kementerian Keuangan di wilayah ini sebesar 2636 orang, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kantor Eselon I | Kantor Operasional | Jumlah SDM |
|----|-----------------|--|-------------|
| 1 | DJBC | 1 Kanwil 5 KPPBC Tipe Madya 2 KPPBC Tipe Pratama | 437 |
| 2 | DJPBN | 3 Kanwil 13 KPPN | 471 |
| 3 | DJKN | 1 Kanwil 5 KPKNL | 208 |
| 4 | DJP | 2 Kanwil 1 KPP Madya 18 KPP Pratama 15 KP2KP | 1477 |
| 5 | SETJEN | 1 KPTIK | 15 |
| 6 | BPPK | 1 BDK | 28 |
| | | Total | 2636 |

- c. Kegiatan diklat yang diselenggarakan di BDK Denpasar, dari segi bidang/kompetensi yang bervariasi, mulai Diklat Prajabatan, Diklat Kesamaptan, Diklat-diklat Teknis dan Fungsional di Anggaran, Perbendaharaan, Kepabeanan dan Cukai, Kekayaan Negara, Perpajakan, Pengembangan SDM dari sisi soft skill, dan diklat-diklat selain bidang-bidang tersebut;
- d. Memiliki staf/pelaksana yang masih muda-muda, dan energik;
- e. Mempunyai networking dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam rangka mendukung kelancaraan pelaksanaan kegiatan diklat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Balai Diklat Keuangan Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Belum mempunyai fasilitas kediklatan yang lengkap, baik gedung kantor, gedung kelas, asrama diklat berikut sarana prasarana lainnya, untuk sementara ini masih memanfaatkan bagian gedung di GKN;
- b. Jumlah Widyaiswara sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kompetensinya;
- c. Belum terbentuknya pengaturan formal dalam sistem manajemen kediklatan di BPPK, untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peranan/hubungan/batasan kewenangan antara instansi pusat dengan UPT;
 - 2) Penyelenggaraan mental fisik disiplin dalam diklat;
 - 3) Ketersediaan dan keseragaman sarana dan prasarana kediklatan.

BAB II

VISI DAN MISI BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR

2.1 Visi Balai Diklat Keuangan Denpasar

Balai Diklat Keuangan Denpasar mempunyai peranan yang sangat penting dalam memastikan para pegawai Kementerian Keuangan di wilayah kerja Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan peran tersebut, Balai Diklat Keuangan Denpasar menetapkan visi: menjadi **lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka di wilayah Bali-Nusra dalam menghasilkan SDM dibidang keuangan negara yang berintegritas dan berkompentensi tinggi.**

2.2 Misi Balai Diklat Keuangan Denpasar

Dalam mendukung tercapainya visi tersebut, Balai Diklat Keuangan Denpasar menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan SDM dibidang Keuangan Negara yang berintegritas dan berkompentensi tinggi dengan mengimplementasikan *corporate university*;
- 2) Mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas;
- 3) Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam mendukung proses pembelajaran;
- 4) Memanfaatkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas;
- 5) Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi , Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengacu pada salah satu tujuan Kementerian Keuangan, yaitu kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan lembaga. Sasaran strategis yang menjadi peran BPPK dari arah kebijakan ini adalah SDM yang kompetitif. Sasaran strategis ini dirinci ke dalam beberapa arah kebijakan. Arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPPK yaitu:

- 1) Integrasi pendidikan dan pelatihan yang jelas dan menyeluruh dalam konsep *corporate university* dengan penguatan lembaga pendidikan kedinasan yang ada saat ini dan penguatan fungsi perencanaan, pengembangan, serta evaluasi pelatihan untuk menjamin terjadinya link and match dengan tujuan strategis organisasi;
- 2) Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan Negara.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan sebagaimana disebutkan diatas diimplementasikan oleh BPPK melalui lima arah kebijakan, yaitu:

- 1) Terwujudnya organisasi yang *fit for purpose* dalam rangka mengembangkan *corporate university* di Kementerian Keuangan;
- 2) Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna;
- 3) Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM;
- 4) Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif;
- 5) Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi profesi/jabatan dan standarisasi..

Dalam mendukung arah kebijakan di atas BPPK menetapkan 5 strategi yaitu:

- 1) Strategi dalam rangka mewujudkan organisasi yang *fit for purpose* untuk *corporate university* di Kementerian Keuangan, dengan cara :
(a) Penataan Organisasi BPPK dengan penguatan fungsi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi diklat, (b) Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan Balai Diklat Kepemimpinan;
- 2) Strategi dalam mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif adalah dengan cara : (a) Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas yang mampu memenuhi pemerataan diklat bagi semua kebutuhan pegawai serta menjadi prioritas nawa cita, (b) Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki keterkaitan (*link and match*) antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan, (c) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik Keuangan Negara-STAN;
- 3) Strategi dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna, dengan cara : (a) Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan, (b) Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan SDM keuangan Negara yang menjadi prioritas, (c) Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD yang akurat. (d) Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk menjadi bagian utama dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan Kementerian Keuangan;
- 4) Strategi dalam mewujudkan layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM dengan cara : (a) Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan kompetensi, (b) Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya agar dapat menjadi spesialis keuangan negara yang mumpuni, (c) Pengembangan budaya riset yang berkualitas;

- 5) Strategi dalam mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standarisasi dengan cara :
- (a) Penerapan standarisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK, (b) Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di BPPK, dan (c) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan Negara.

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas, BPPK memiliki sembilan kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya bagi Unit Kerja di lingkungan BPPK;
- 2) Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- 3) Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanaan dan Cukai;
- 4) Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
- 5) Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan;
- 6) Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanaan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
- 7) Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana bagi pegawai Kementerian Keuangan;
- 8) Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan;
- 9) Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah.

3.2 Sasaran dan Strategi Balai Diklat Keuangan Denpasar

Dalam menjalankan Visi dan Misi, Balai Diklat Keuangan Denpasar menetapkan sasaran dan strategi yang mengacu sepenuhnya pada arah kebijakan dan strategi-strategi yang telah ditetapkan oleh BPPK, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan SDM Keuangan Negara yang berintegritas dan berkompotensi tinggi, dengan mengimplementasikan *corporate university* BPPK, melalui:
 - a) Melaksanakan Pendidikan Program Diploma I Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN di Balai Diklat Keuangan Denpasar;
 - b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang keuangan Negara yang merupakan Program *Mandatory* dari setiap Pusdiklat di BPPK;
 - c) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keuangan Negara berdasarkan hasil IKD/kebutuhan mendesak Unit Pengguna di wilayah Bali-Nusra;
 - d) Memenuhi kebutuhan akan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang meningkat signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas, termasuk penyebaran 40 jamlat/pegawai/tahun kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan, khususnya di wilayah Bali-Nusra.
- 2) Membangun sarana dan prasarana diklat yang mengakomodasi konsep *green building* dan pengarusutamaan gender, melalui:
 - a) Melakukan upaya percepatan proses administrasi pengalihan/transfer pencatatan SIMAK BMN atas rumah dinas DJPB di daerah Renon Denpasar untuk Gedung BDK Denpasar;
 - b) Menyiapkan *grand desain* Gedung Balai Diklat Keuangan;
 - c) Melakukan penghapusan BMN atas rumah dinas DJPB di daerah Renon Denpasar untuk Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar;
 - d) Melakukan Pembangunan Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar mengakomodasi konsep *green building* dan pengarusutamaan gender;
 - e) Melakukan Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam mendukung proses pembelajaran.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, Balai Diklat Keuangan Denpasar didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur. Kedudukan, tugas dan fungsi Balai Diklat Keuangan Denpasar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pada tahun 2015-2019, Balai Diklat Keuangan Denpasar akan berusaha mengembangkan SDM Kementerian Keuangan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. Diklat yang akan dilaksanakan Balai Diklat Keuangan Denpasar pada tahun 2015-2019 adalah diklat-diklat yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk melaksanakan program tersebut Balai Diklat Keuangan Denpasar juga didukung oleh pendanaan yang memadai dengan jumlah yang mengalami kecenderungan meningkat di setiap tahun. Peningkatan jumlah dana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas penyelenggaraan program diklat di Balai Diklat Keuangan Denpasar dalam memenuhi kebutuhan unit-unit pengguna.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan Balai Diklat Keuangan Denpasar, maka setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan oleh BPPK, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan
Tenis Lainnya.
 - Sasaran Kegiatan (*Outcome*): Tata kelola BDK Denpasar yang baik
 - Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a) Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar
 - b) Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

2) Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di wilayah kerja Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yang meliputi:

- a) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- b) Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- c) Bidang Perpajakan;
- d) Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
- e) Bidang Pengembangan SDM;
- f) Bidang selain Anggaran, Perbendaharaan, Kepabeanan, Cukai, Perpajakan, Kekayaan Negara, dan Perimbangan Keuangan.

Adapun sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan (*Outcome*) : Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi.
- Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a) Nilai Peningkatan Kompetensi SDM;
 - b) Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai;
 - c) Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.

3) Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Keuangan di BDK Denpasar.

- Sasaran Kegiatan (*Outcome*) : Mencetak birokrat berintegritas, unggul, dan berkualitas tinggi.
- Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase lulusan program diploma dengan predikat minimal baik.

Selanjutnya, Target Kinerja Balai Diklat Keuangan Denpasar Tahun 2015 sd 2019, adalah sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja
BDK Denpasar Tahun 2015-2019

| RENCANA KERJA TAHUN 2015-2019 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Peserta Diklat | 1308 | 1052 | 1105 | 1160 | 1218 |
| 2 | Jamlator | 83.901 | 75.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 3 | Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal Baik | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 4 | Persentase Program Diklat yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kompetensi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Indeks Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparaturnya Kementerian Keuangan yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai visi dan misi Balai Diklat Keuangan Denpasar Tahun 2015 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan
BDK Denpasar Tahun 2015-2019

| No | Program | Indikasi Kebutuhan Pendanaan | | | | |
|--------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK | 2.334.960.000 | 2.505.540.000 | 2.630.817.000 | 2.762.357.850 | 2.900.475.743 |
| 2 | Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat di daerah, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; • Bidang Kepabeanaan dan Cukai; • Bidang Perpajakan; • Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan; • Bidang selain anggaran, perbendaharaan, kepabeanaan, cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan. | 5.736.927.000 | 4.615.000.000 | 4.845.750.000 | 5.088.037.500 | 5.342.439.375 |
| 3 | Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Program Diploma I Keuangan di BDK Denpasar | - | - | - | - | - |
| 4 | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kediklatan | 182.618.000 | 3.238.000.000 | 32.216.000.000 | 5.000.000.000 | 182.618.000 |
| Total | | 8.254.505.000 | 10.358.540.000 | 39.692.567.000 | 12.850.395.350 | 8.425.533.118 |

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran masing-masing program dan kegiatan dari tahun 2015 s.d. 2019 tertuang dalam Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Diklat Keuangan Denpasar tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Balai Diklat Keuangan Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan Negara, dengan wilayah kerja Bali-Nusra.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Balai Diklat Keuangan Denpasar dalam mewujudkan visi: menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara berintegritas dan berkompotensi tinggi. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam *roadmap* yang dilengkapi dengan target-target indikator kinerja untuk memantau keberhasilan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis ini.